

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggraini, A.M.Tri, 2003, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Per se Illegal atau Rule of Reason*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Lubis, Andi Fahmi dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta.
- Mamudji, Sri et. al., 2006, *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Meryanti, Dewi, 2010, *Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Meyliana, Devi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang.
- Moleong, Lexi J., 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyada Karya, Bandung.
- Munadiya, Riris, 2011, *Jurnal Persaingan Usaha: Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*, Penerbit KPPU, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Prayoga, Ayudha-D., et al., 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta.

- Puspaningrum, Galuh, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Samudera, Teguh, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta.
- Simbolon, Alum, 2009, *Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1.
- Siswanto, Arie, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibowo, Destivano dan Sinaga, Harjon, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. Internet

- Andreas, Damianus, “Yamaha-Honda Mengkritik Keputusan Kartel KPPU”, <https://tirto.id/yamaha--honda-mengkritik-keputusan-kartel-kppu-cjZR>, diakses pada tanggal 11 November 2017.
- Ghozali, Khairul Imam, “Ini Alasan Honda Mangkir di Sidang Perdana KPPU”, dalam <https://oto.detik.com/mobil/d-3258883/ini-alasan-honda-mangkir-di-sidang-perdana-kppu>, diakses pada tanggal 8 November 2017.
- Idris, Muhammad, “KPPU Tangani 348 Perkara, Mayoritas Persekongkolan Tender”, dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3515801/kppu-tangani-348-perkara-mayoritas-persekongkolan-tender> diakses tanggal 11 November 2017.

KPPU, “Putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016”, dalam <http://kppu.go.id/id/blog/2017/02/putusan-perkara-no-04kppu-i/2016>, diakses pada tanggal 30 Maret 2018.

Padmasari, Salviah Ika, “KPPU beberkan 3 bukti persekongkolan kartel motor matik”, <http://www.merdeka.com/uang/kppu-beberkan-3-bukti-persekongkolan-kartel-motor-matik.html> diakses pada tanggal 11 November 2017.

Perdana, Hadi Ardi, “KPPU: Harga Motor Matik Di Indonesia Seharusnya Cuma Rp. 12 Juta”, <https://www.merdeka.com/uang/kppu-harga-motor-matik-di-indonesia-seharusnya-cuma-rp-12-juta.html> diakses pada tanggal 8 November 2017.

Putra, Nanda Narendra, “Berjuang Mencari Legitimasi Indirect Evidence”, dalam *hukum online.com*, diakses pada tanggal 18 Juni 2018.

Febri Ardani Saragih, “Yamaha Juga Lanjut Kasasi Tentang Kartel”, dalam <http://otomotif.kompas.com/read/2017/06/082300215/yamaha-juga-lanjut-kasasi-tentang-kartel> diakses pada tanggal 6 Desember 2017.

Simorangkir, Eduardo, “Honda Dan Yamaha Bantah Lakukan Kartel, Ini Buktinya”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3391641/honda-dan-yamaha-bantah-lakukan-kartel-ini-buktinya>, diakses pada tanggal 8 November 2017.

Tanpa Nama, “Cium Kartel Harga Motor Skutik Yamaha Dan Honda, KPPU Gelar Sidang Perdana”, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/07/cium-kartel-harga-motor-skutik-yamaha-dan-honda-kppu-gelar-sidang-perdana/>, diakses pada tanggal 8 November 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817.

D. Peraturan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. Putusan

Putusan KPPU Perkara Nomor:04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia tanggal 20 Febuari 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN Jkt.Utr. tentang Perkara KPPU Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang keberatan terhadap putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 tanggal 28 November 2017.